

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR FINANSIAL

Saskiya Rahma Wardhani
Nur Cahyonowati
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the relation of corporate governance and corporate social responsibility disclosure on public companies listed at the Jakarta Stock Exchange. Disclosure of corporate social responsibility was measured by using modified Hackton and Milne's (1996) indicators. This research predicts that corporate social disclosure is determined by the characteristics of corporate governance i.e. size of the board of commissioners; independent commissioners, independent audit committees, government ownership, and presence of women the board of commissioners. Company size and profitability is used as control variables. This sample consists of companies in financial sector. There are 45 companies fulfilling the sampling criterion. The data were then analyzed using multiple regression analysis. The results indicated that the size of the board of commissioners, government ownership, independent audit committee, and company size had a positive and significant relation on the disclosure of corporate social responsibility; but the independent commissioners, the presence of women in the board of commissioners, and profitability did not have a significant relationship.

Keywords: corporate social responsibility disclosure, corporate governance

PENDAHULUAN

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) selama sepuluh tahun terakhir ini semakin populer, terlebih setelah pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkannya sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat dalam rangka pemulihan sektor ekonomi. Hal itu diwujudkan dalam sebuah keyakinan bahwa GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Pada dasarnya terdapat lima prinsip dalam GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, serta Fairness*. Salah satu prinsip penting dalam GCG yang erat kaitannya dengan CSR dan merupakan aspek pertanggungjawaban dari setiap kegiatan perusahaan adalah *responsibility*. Implementasi dari aspek ini tidak terlepas dengan masyarakat sekitar. Daniri (2009) menyatakan bahwa penerapan konsep GCG, termasuk dalam hal ini aspek *responsibility*, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan informasi yang wajib diungkapkan baik dalam *annual report* perusahaan maupun disajikan secara terpisah dalam *sustainability report* (Post *et.al.*, 2002 dalam Solihin 2009). Dalam perkembangannya terdapat suatu gagasan yang dikemukakan oleh Elkington (1997), dikenal dengan *The Triple Bottom Line*. Pada gagasan tersebut dikemukakan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, sehingga tidak hanya aspek finansial yang harus diperhatikan namun juga aspek sosial dan aspek lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

Utama (2007) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR (www.ui.edu). Di Indonesia, praktik CSR belum menjadi perilaku umum, karena banyak perusahaan yang menganggapnya sebagai *cost center*. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar sehingga penerapannya

disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga pada sektor finansial. Sektor finansial diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama sebagai lembaga keuangan melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya. Dalam kenyataannya, sekarang ini sudah banyak industri yang bergerak dalam sektor finansial melakukan dan melaporkan kegiatan CSR-nya namun masih terdapat pula perusahaan pada sektor finansial yang belum mengungkapkan CSR-nya. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki *CSR guidelines* untuk institusi keuangan seperti halnya China.

Pentingnya mengungkapkan CSR pada sektor keuangan telah terbukti dari sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada sektor keuangan di beberapa negara sudah cukup banyak dilakukan. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Branco (2006) pada sejumlah bank-bank Portugis, diyakini bahwa CSR merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*-nya. Hal ini sejalan dengan pernyataan McDonald and Rudle-Thiele (2008) yang mengatakan bahwa program-program CSR yang dilaksanakan hampir seluruh bank-bank ritel di dunia

bertujuan untuk memperkuat reputasi bank dan hubungan dengan para *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan Brian D, Netto dkk (2011) pada sektor finansial di Bangladesh menyatakan bahwa dengan melakukan pengungkapan CSR, perusahaan dapat meningkatkan *image* dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan pada sector non keuangan, khususnya industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perusahaan yang terbaru, yaitu UU No, 40 (2007) pasal 74. Penelitian tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor finansial masih jarang dilakukan. Hal ini kemungkinan disebabkan perusahaan pada sektor finansial tidak terlibat langsung pada kegiatan usaha eksplorasi sumber daya alam, namun demikian sektor finansial menyediakan dana pinjaman untuk kegiatan usaha. Terkait dengan hal tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan pada sektor finansial. Penelitian ini menggunakan lima karakteristik *corporate governance* sebagai determinan CSR yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan pemerintah, dan keberadaan wanita dalam dewan komisaris.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Freeman (1984) *Stakeholder* adalah setiap kelompok/individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum dari sebuah organisasi. *Stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Yang termasuk *stakeholder* primer adalah *shareholder*, pemilik, investor, karyawan maupun *customer*. Sedangkan yang termasuk *stakeholder* sekunder adalah pemerintah, masyarakat umum dan lingkungan. Pengungkapan CSR ini penting karena para *stakeholder* perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan *stakeholder*. Sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang telah dilakukannya.

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi merupakan asumsi secara umum yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan didasarkan dan disesuaikan dengan konsep, nilai kepercayaan, dan ketentuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menampakkan tujuannya yang sejalan dengan masyarakat.

Brown dan Deegan (1998) dalam Gunawan (2005) mengungkapkan bahwa teori legitimasi merupakan kontrak sosial yang secara tidak langsung menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada luas batas dan norma sosial yang dijalankan perusahaan. Batas dan norma sosial mungkin berubah dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan secara berkelanjutan memperlihatkan bahwa kegiatan operasinya adalah sesuai dengan batas dan norma tersebut. Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan

sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2008), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Muhammad Yasin, 2007). Jadi fungsi lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediari. Di Indonesia lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan lembaga perantara yang diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan

dana dalam bentuk tabungan. Lembaga Keuangan Bank ini sering juga disebut sebagai perbankan. Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri (M. Fuad, 2000)

Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *internal* dan *eksternal* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Mekanisme tata kelola yang baik telah diyakini mampu untuk mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan biaya eksternal dalam kegiatan operasinya.

Penelitian terdahulu (Sembiring (2005), Said et al., (2009), Novita dan Djakman (2008), Ghazali (2007), Khan (2010), Huafang dan Jianguo (2007), dan Waryanto (2010)) telah menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola suatu perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, sosial dan lingkungan. Sembiring (2005) menemukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian Said, et al., (2009) menunjukkan bahwa hanya variabel kepemilikan pemerintah dan komite audit yang berhubungan positif dan signifikan dengan luas pengungkapan. Dengan menggunakan indikator GRI (*Global Reporting Initiative*), Novita dan Djakman (2008) menemukan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ghazali (2007) menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah variabel *government ownership* dan *director ownership*. Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen dan adanya orang yang berkebangsaan asing dalam dewan

komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Huafang dan Jianguo (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan *blockholder* yang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepemilikan manajerial, *state ownership*, dan *legal-person ownership* mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Waryanto (2010) menunjukkan bahwa hanya variabel kepemilikan terkonsentrasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban yang lebih intensif kepada pihak eksternal yang menanggung biaya eksternal akibat dari kegiatan operasi perusahaan. Tata kelola yang baik dapat tercapai apabila manajemen yang berkedudukan sebagai agen mampu mengelola aset yang dimiliki pemilik perusahaan (*principal*). Melalui mekanisme kontrol, *principal* dapat mengendalikan kebijakan manajemen ke arah pertanggungjawaban yang

berpijak pada *triple bottom line*. Karakteristik tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan oleh jumlah dewan komisaris yang jumlahnya lebih dari satu sehingga fungsi kontrol menjadi lebih baik dibandingkan jika hanya terdapat satu Dewan Komisaris. Keberadaan komisaris independen dan komite audit independen juga menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai monitoring yang efektif dan independen. Adanya kepemilikan oleh pemerintah juga dapat mendorong tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik karena pemerintah memiliki peran besar sebagai regulator. Selanjutnya, keseimbangan gender juga menjadi salah satu aspek yang dinilai baik pada tata kelola perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menghipotesiskan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan social perusahaan. Karakteristik tata kelola perusahaan yang diteliti adalah jumlah Dewan Komisaris, Komisaris independen, Komite audit independen, kepemilikan pemerintah, keberadaan wanita dalam Dewan Komisaris. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

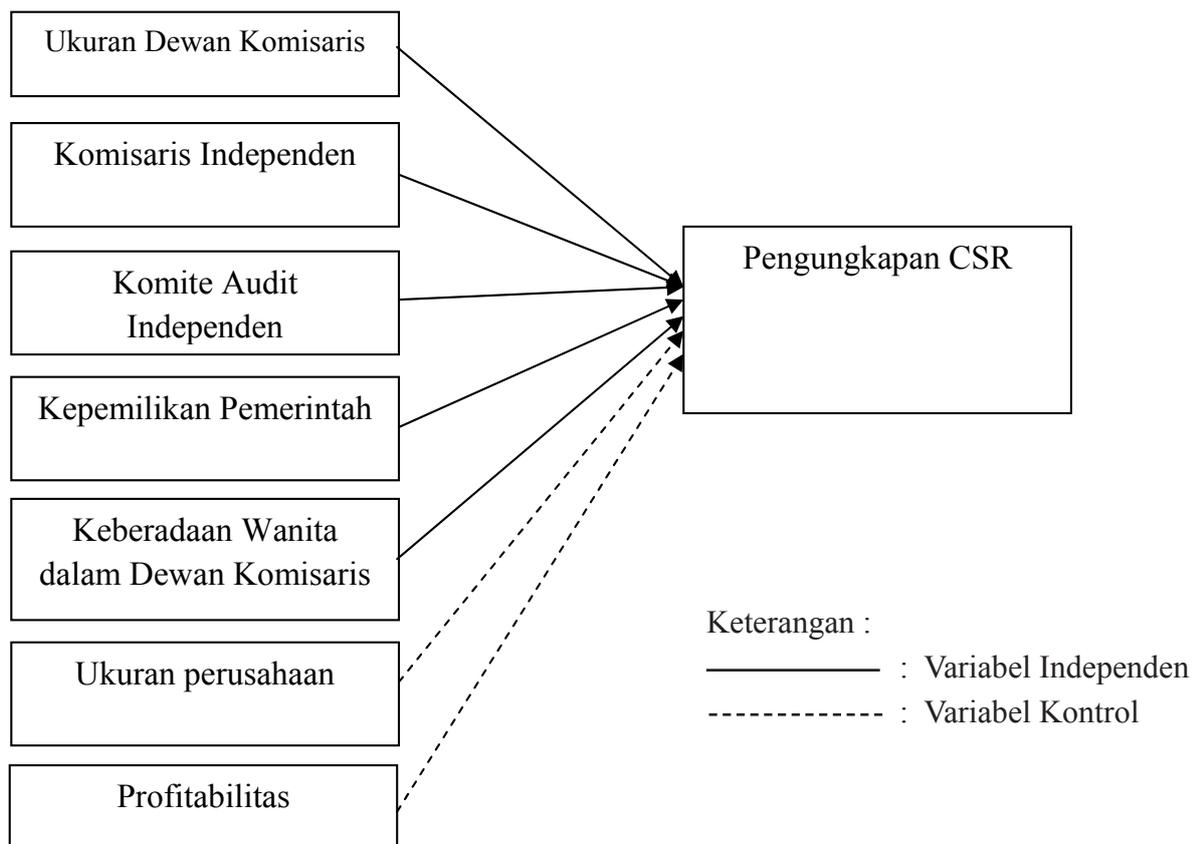
- H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR
- H2 : Proporsi komisaris independen

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR

- H3 : Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR
- H4 : Kepemilikan saham oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR
- H5 : Keberadaan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Penelitian ini juga mempertimbangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Di dalam teori agensi menyatakan bahwa apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Gambar 1 Hubungan antara Karakteristik GCG dan Tingkat Pengungkapan CSR



METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada sektor finansial yang *listed* di Bursa Efek Indonesia menurut *Fact Book* BEI tahun 2010 dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan yang memiliki *annual report* tahun 2010 yang dapat diakses dari *website* masing-masing perusahaan.
2. Mengungkapkan (*disclosure*) informasi tentang tanggung jawab sosial.
3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti.

Definisi Operasional Variabel

Variabel tingkat pengungkapan CSR (CSRDI)

Untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR pada penelitian ini menggunakan *checklist* yang diadopsi dari penelitian Hackton dan Milne (1999) dengan beberapa modifikasi sesuai dengan kegiatan operasi perusahaan pada sektor finansial. *Checklist* dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup tujuh kategori, yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, lain-lain tenaga kerja,

produk, keerlibatan masyarakat dan umum.

Checklist menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1 akan diberikan jika setiap item tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator yang digunakan. Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan indikator. Pendekatan seperti ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Novita dan Djakman, 2008. Total *checklist* dihitung untuk mendapatkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan kemudian dihitung dengan membagi jumlah item dengan jumlah item yang diharapkan perusahaan sesuai dengan indikator yang digunakan, yaitu lima puluh sembilan item.

Perhitungan indeks pengungkapan ini dinotasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$CSRDI = \frac{V}{59}$$

Keterangan:

CSRDI = Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
V = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Ukuran dewan komisaris diketahui dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan (Said, *et al.*, 2009).

Variabel Proporsi Komisaris Independen (DKI)

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Konsisten dengan Said, *et. al.*, (2009) proporsi komisaris independen dihitung dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Variabel proporsi Komite Audit Independen (KMA)

Komite audit Independen merupakan anggota komite audit yang berasal dari luar emiten. Indikator komite audit independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah anggota komite audit independen suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

$$\text{Komite Audit Independen} = \frac{\text{Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Anggota Komite Audit}}$$

Variabel Kepemilikan Pemerintah (PEM)

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Variabel kepemilikan pemerintah

diukur dengan pendekatan dikotomi yang menggunakan skala 1 jika di dalam perusahaan terdapat kepemilikan pemerintah dan skala 0 jika dalam perusahaan tidak terdapat kepemilikan pemerintah (Ghazali, 2007).

Variabel Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris (WAN)

Keberadaan wanita dalam dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan dikotomi yang menggunakan skala 1 jika di dalam perusahaan terdapat wanita dalam dewan komisaris dan skala 0 jika dalam perusahaan tidak terdapat wanita dalam dewan komisaris.

Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan adalah jumlah aktiva (aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva lain – lain), jumlah penjualan, atau jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode pelaporan keuangan (Sembiring, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan proksi *total asset* dalam pengukuran *firm size*. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Size} = \log (\text{nilai buku } \textit{total asset})$$

Variabel Profitabilitas (ROE)

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : *return of equity*, *return*

on assets, earning per share, net profit dan operating ratio. Namun dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah return on equity (ROE) seperti Ho dan Wang (2001). ROE dapat diukur dengan menggunakan persamaan senagai berikut :

$$\text{Return on equity (ROE)} = \frac{(\text{Net Income (laba bersih)})/(\text{Shareholder's Equity (Modal Sendiri)})$$

Metoda Analisis

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model penelitian dengan menggunakan *software* SPSS Versi 17.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan

CSR perusahaan dirumuskan pada persamaan berikut:

$$\text{CSRDI}_i = \alpha_0 + \beta_1 \text{UDK}_i + \beta_2 \text{DKI}_i + \beta_3 \text{KMA}_i + \beta_4 \text{PEM}_i + \beta_5 \text{WAN}_i + \beta_6 \text{SIZE}_i + \beta_7 \text{ROE}_i + e_i$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* (IDX) 2010 diketahui bahwa perusahaan pada sektor finansial yang terdaftar sebanyak 69 perusahaan. Dan hanya 45 perusahaan dari jumlah tersebut yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan penelitian dengan metode *purposive sampling*, sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

KETERANGAN	JML
Jumlah perusahaan finansial yang terdaftar di IDX 2010	69
Data tidak berhasil diperoleh secara fisik baik di IDX maupun Web	(8)
Data yang tersedia secara fisik	61
Data rusak, tidak lengkap, dan tidak memenuhi kriteria	(16)
Jumlah data yang digunakan sebagai sampel	45

Hasil analisis deskriptif dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: menggunakan *SPSS 17.0* dari variabel-variabel

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Index CSR disclosure</i>	45	0,136	0,610	0,306	0,115
Ukuran Dewan Komisaris	45	2,000	9,000	4,400	1,763
Dewan Komisaris Independen	45	0,333	0,750	0,546	0,105
Komite Audit Independen	45	0,333	0,750	0,609	0,104
Ukuran perusahaan	45	24,90	33,63	29,70	2,249
Profitabilitas	45	0,175	43,830	14,82	9,919
<i>Valid N (listwise)</i>	45				

Sumber: data diolah (2011)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di sektor finansial di Indonesia melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunannya hanya sebesar 30,6% dari total item CSR. Artinya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan pada sektor finansial di Indonesia tergolong masih rendah. Walaupun pemerintah secara formal telah mewajibkan kepada perusahaan di Indonesia khususnya yang terdaftar di IDX untuk melakukan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Pasar Modal No. 25 Tahun 2007, namun dari hasil penelitian ini terbukti bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial

oleh perusahaan khususnya pada sektor finansial masih tergolong rendah.

Masih rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih belum efektif. Perusahaan kemungkinan akan melakukan kegiatan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial hanya untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh badan regulasi pemerintah. Belum adanya aturan baku mengenai pelaksanaan, pelaporan, dan pengungkapan CSR dapat menjadikan salah satu kemungkinan rendahnya tingkat pengungkapan CSR di Indonesia.

Tabel 3 Gambaran Kepemilikan saham pemerintah dan keberadaan wanita dalam Dewan Komisaris

		Frekuensi	Persen
<i>Kepemilikan Saham Pemerintah</i>			
	Tidak ada	38	84,4
	Ada	7	15,6
<i>Keberadaan Wanita dalam Dewan komisaris</i>			
	Tidak ada	28	62,2
	Ada	17	37,8

N = 45

Sumber: data diolah (2011)

Berikut adalah tabel hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Untuk CSR disclosure

Model	Coeff	t-value	Sig
Constant	-0,527	-2,605	0,013
Independent :UDK	0,026	3,047	0,004**
DKI	0,058	0,515	0,610
KMA	0,289	2,226	0,032**
PEM	0,109	2,916	0,006**
WAN	-0,002	-0,082	0,935

<i>Model</i>	<i>Coeff</i>	<i>t-value</i>	<i>Sig</i>
<i>Control</i> : SIZE	0,016	2,509	0,017**
ROE	0,001	0,751	0,458
<i>Adjusted R²</i>	0.570		
<i>R</i>	0,799		
<i>F statistics</i>	9,326***		
<i>SEE</i>	0,0753		
N = 45			
* Signifikan pada 0,10; ** signifikan pada 0,05; *** signifikan pada 0,01 UDK: Ukuran dewan komisaris, DKI: Dewan komisaris independen, KMA: komite audit independen, PEM: kepemilikan pemerintah, WAN: keberadaan wanita dalam dewan komisaris, SIZE: ukuran perusahaan, ROE: profitabilitas.			

Sumber: data diolah (2011)

Berdasarkan tabel 4, diperoleh koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan *adjusted R²* sebesar 0,570, hal ini berarti 57% variabilitas variabel dependen (CSRDI) dapat dijelaskan oleh variabel independennya dan 43% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu nilai R sebesar 0,799 dan *Standart Error Estimate* (SEE) sebesar 0,075339 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen cukup kuat dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Dengan nilai F hitung sebesar 9,326 dan signifikansi 0,000 pada tingkat $\alpha = 0,05$, menunjukkan bahwa kelima variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan saham Pemerintah dan keberadaan wanita dalam dewan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel pengungkapan CSR (CSRDI).

Hubungan antara Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian variabel

Ukuran Dewan Komisaris (UDK) terhadap tingkat pengungkapan CSR (CSRDI), dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara variabel Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR dapat diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan CSR. Artinya semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Jadi semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO

dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif.

Hubungan antara Proporsi Komisaris Independen dan Pengungkapan CSR

Hasil uji regresi linear berganda untuk CSR *disclosure* menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan meskipun memiliki arah yang positif. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa ada hubungan positif antara proporsi komisaris independen dan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Said, *et.al.* (2009) yang menyatakan tidak menemukan hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan menjadikan pengungkapan CSR menjadi lebih luas. Untuk mencapai transparansi dan pengungkapan CSR yang lebih luas, maka pemilihan komisaris independen harus memperhatikan kemampuan, dan integritasnya, sehingga dapat melakukan fungsi *monitoring*, pengendalian dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan. Namun apabila perusahaan telah memperoleh

legitimasi yang kuat baik dari masyarakat maupun investor, fungsi komisaris independen menjadi tidak efektif. Dengan demikian perusahaan akan lebih cenderung berpendapat tidak mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Hubungan antara Komite Audit Independen dan Pengungkapan CSR

Hasil uji regresi linier berganda untuk CSR *disclosure* menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit (KMA) memiliki hubungan arah positif dan signifikan. Artinya variabel ukuran komite audit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan luas pengungkapan CSR perusahaan sektor finansial di Indonesia. Dengan demikian hipotesis bahwa proporsi komite audit independen berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR dapat diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said *et.al.*, (2009) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara ukuran komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela. Tanggung jawab komite audit adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan. Di Indonesia keanggotaan Komite audit diatur berdasarkan

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa komite audit yang dimiliki minimal terdiri dari 1 orang komisaris Independen dan 2 orang anggota lainnya berasal dari luar emiten (independen). Semakin banyak komite audit independen maka pengawasan dan pemeriksaan terhadap mekanisme manajemen perusahaan akan lebih efektif, sehingga perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih luas.

Hubungan antara Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan CSR

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan yang signifikan dan arah yang positif dengan luas pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Nasir dan Abdullah (2004), Said *et.al.*, (2009), dan Amran dan Devi (2008) yang menyebutkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki hubungan dengan luas pengungkapan CSR. Pemerintah yang bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR. Dengan demikian semakin besar kepemilikan pemerintah maka akan menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

Hubungan Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pengujian variabel keberadaan wanita dalam dewan komisaris menunjukkan bahwa ada tidaknya anggota wanita dalam proporsi dewan komisaris tidak ada hubungannya dengan luas pengungkapan CSR. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) yang menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan wanita pada posisi puncak masih sangat sedikit di Indonesia. Hal ini disebabkan di Indonesia menganut sistem kekerabatan *patrilineal* (garis keturunan ayah) dimana laki-laki memegang *control* (kendali) atas seluruh anggota keluarga, kepemilikan barang, sumber pendapatan dan pemegang keputusan utama (<http://id.wikipedia.org>). Adanya budaya tersebut menyebabkan keberadaan wanita dalam posisi dewan komisaris tidak memiliki hubungan dengan luasnya pengungkapan informasi sosial.

Variabel Kontrol

Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan CSR telah banyak dilakukan. Hasil uji parsial (t test) menunjukkan bahwa variabel kontrol ukuran

perusahaan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan luas pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Amran dan Devi (2008), dan Machmud dan Djakman (2008) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan luas pengungkapan CSR.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan variabel kontrol profitabilitas ROE dan luas pengungkapan CSR tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hasil penelitian ini mendukung penemuan Said *et.al.*, (2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROE) tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengungkapan CSR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep GCG mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut akan tercipta pula manajemen internal perusahaan yang baik sehingga pengungkapan informasi dapat dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris,

dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan saham pemerintah, dan keberadaan wanita dalam dewan komisaris, serta ukuran perusahaan dan profitabilitas secara simultan mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan CSR, yaitu sebesar 54%. Hal ini berarti karakteristik GCG tersebut dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dengan baik sehingga mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Variabel CGC yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada sektor finansial adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit independen, kepemilikan saham pemerintah. Variabel GCG yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada sektor finansial adalah proporsi komisaris independen dan keberadaan wanita dalam dewan direksi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan terlalu kecil, yaitu hanya 45 perusahaan keuangan dari 69 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan pengamatan hanya satu periode saja. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak dan melakukan analisis *time series*.
2. Penelitian ini hanya melihat satu media pelaporan dalam menentukan pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu laporan tahunan. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan

media pengungkapan CSR yang lain, yaitu *sustainability reporting*.

3. Kodifikasi item pengungkapan social hanya dilakukan oleh 1 orang sehingga membuat subyektifitas penilaian muncul dalam meneliti pengungkapan CSR. Pengukuran CSR sebaiknya dilakukan dengan menggunakan lebih dari 1 panelis sehingga dapat memperkecil subyektifitas penilaian CSR.
4. Indikator *content analysis* yang digunakan dalam penelitian ini masih banyak yang tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan CSR pada sektor finansial. Penelitian mendatang sebaiknya dapat menentukan item CSR yang sesuai dengan kegiatan operasi sektor finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtaruddin, M., M.Hossain, dan L. Yao. 2009. "Corporate Governance and voluntary Disclosure in Corporate Annual reports of Malaysian Listed Firms". JAMAR. Vol.7 Number 1, hal.1-20
- Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. "The Impact Of Government and Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)". Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol 23, No.4, hal 386-404
- Anggraini, Fr. RR. 2006. " Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan – Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)". *Simposium Nasional 9*.Padang
- Bapepam, 2000. Surat Edaran bapepam Nomor SE-03/PM/2000. Tentang Keharusan Pembentukan Komite Audit
- 2004. Keputusan Ketua bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit
- Branco, M. C dan L. L Rodrigues, 2006. "Communication of CSR by Portuguese Banks". *International Journal of Corporate Communication*, Vol. 11, No. 3, hal. 232-248
- Brian, D Netto. 2011. Corporate Social Disclosure in Bangladesh: A Study of the Financial Sector. *International Review of Business Research Papers Vol. 7. No. 2. March 2011. Pp. 37-55*
- Carter, D.A., Simkins, B.J. and Simpson, W.G. (2003), "Corporate governance, board diversity and firm value", *The Financial Review*, Vol. 38, pp. 33-53.
- Daniri, Mas Achmad. 2008. "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". <http://www.madani-ri.com>, Diakses tanggal 25 Juni 2010.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line of 21aacaentury Bussiness*. Oxford, Ux K : Capstone
- Forum corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance)*. Jakarta
- Ghazali Mohd, Nazli A. 2009. Ownership structure and corporate social responsibility disclosure : some

- Malaysian evidence. *Corporate Governance Journal*. Vol 7. No. 3, pp 251-266.
- Ghozali, Imam, 2006. *SPSS. Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, I dan A. Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Gray, R., R. Kouhy, dan S. Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting. A Review of the Literature and Longitudinal Study of UK.
- Hackton, D., dan M.J. Milne. 1996. "Some determinants of social and environmental disclosure in New Zealand companies" *Accounting, Auditing and Accountability journal*. Vol. 9. No.1. Hal 77-108
- Haniffa, R.M. and Cooke, T.E. (2005), "The impact of culture and governance on corporate social reporting", *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, pp. 391-430.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. *Teori Akuntansi* terjemahan dari *Accounting Theory*. Interaksara. Jakarta.
- Herawaty, Vinola. 2008. "Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variable* dari Pengaruh *Earnings Management* terhadap Nilai Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak.
- (<http://id.wikipedia.org>).
- Huafang, X dan Y.Jianguo 2007."Ownership Structure, Board Composition, and Corporate Voluntary Disclosure Evidence from Listed Companies in China". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22. No. 6. Hal 604-619
- Huse, M., and Solberg, A.G. (2006), "Gender-related boardroom dynamics: how Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards", *Women in Management Review*, Vol. 21 No. 2, pp. 113-30.
- Ibrahim, Majid. 2007."pengaruh struktur internal governance terhadap earning manajemen" *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Jakarta : Salemba Empat.
- Isnanta, Rudi. 2008. " Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Islam Indonesia.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1976. "Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics 3*. hal 305-360.
- Kirana, R. S. 2009. *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana yang tidak dipublikasikan Universitas Sebelas Maret
- Khan, Uz-Zaman. 2010. The Effect of Corporate Governance Elements on corporate Social Responsibility (CSR) Reporting. *International Journal of Law and Management*. Vol.52. No. 2

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- M. Sinaga, Andriyati. 2010. "Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro
- M. Fuad dkk. 2000. Pengantar Bisnis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Mahatma Pian K.S., Angling, 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan regulasi pemerintah Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Machmud, Novita dan chaerul D. Djakman. 2008. "Pengaruh struktur Kepemilikan Terhadap Luas pengungkapan Tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan : studi empiriis pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006". *Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- McDonald, Lynette M. and Rundle-Thiele, Sharyn R. (2008) *Corporate social responsibility and bank customer satisfaction: a research agenda*. *International Journal of Bank Marketing*, 26 (3). pp. 170-182. ISSN 0265-2323
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. Makalah "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif". Universitas Indonesia.
- Nasir, Mohd N. A. dan Abdulla, S. 2004. "Voluntary disclosure and corporate governance among financially distressed firms in Malaysia" *Financial Reporting, Regulation and Governance*, Vol.3 No.1.
- O'Donovan, G. 2002. "Environmental Disclosure in the Annual Report : Extending them Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory". *Accounting, auditing & Accountability Journal*. Vol. 15. No. 3. Pp. 344-371.
- OECD, 1999. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Pemerintah Indonesia, 2007. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Reverte, C. 2008. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms", *Journal of Business Ethics (2009)* 88:351–366 DOI 10.1007/s10551-008-9968-9.
- Roberts, R.W. 1992, "Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 17, No.6, pp. 595-612.
- Rosmasita, H. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia
- Said, R., Y. Zainuddin, dan H. Haron. 2009. "The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*". Vol.5, No.2,

- Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2007. "Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earnng Response Coefficient (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa efek Jakarta)." Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. "Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". **Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI**, Surabaya, 16-17 Oktober 2003
- 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa efek Jakarta". **Simposium Nasional Akuntansi 8**. Solo.
- Sulastini, sri. 2007. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Social Disclosure* Perusahaan manufaktur Yang Telah *Go Public*. Skripsi pada Jurusan Akuntansi FE Universitas Negeri Semarang.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. Salemba 4 Jakarta
- Supranto. 2001. *Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Taridi, Tirmidzi, 2009. *Perkembangan GCG di Indonesia. Seminar Nasional "Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and Modelling GCG in Indonesia"*. Yogyakarta.
- Tilt, C. A, 1994. "The Influence of External Presure Groups on Corporate Social Disclosure, Some Empirical Evidence." *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 7, No. 4, hal. 47-72
- Ujiyantho, Muh. Arief., dan Bambang Agus Pramuka. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. Makassar.
- Utama, Sidharta. 2007. "Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia". www.ui.edu. Diakses tanggal 20 Juni 2010.
- Wang, J. and Coffey, S. (1992), "Board composition and corporate philanthropy", *Journal of Business Ethics*, Vol. 11, pp. 771-8.
- Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik Good Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Skripsi yang Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- www.cic-fcgi.org
- www.csrindonesia.com
- www.idx.co.id
- Yasin, Mohammad dan Sri Ethicawati. 2007. *Ekonomi Pelajaran IPS Terpadu*. Jakarta : Ganeca Exact.
- Yuliani, Rahma. 2003. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan di Indonesia*, Tesis S2 Magister Akuntansi Undip (tidak Dipublikasikan).

LAMPIRAN

Lembar *Check-List* Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Sektor Finansial Di Indonesia

No	Item Pengungkapan Aspek Sosial	Ya	Tidak
LINGKUNGAN			
1	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi		
2	Penggunaan material daur ulang		
3	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan		
4	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan		
5	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah Lingkungan		
6	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah		
7	Perlindungan lingkungan hidup		
ENERGI			
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan Operasi		
2	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi Energy		
3	Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan		
KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA			
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan Kerja		
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental		
3	Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja		
4	Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan Kerja		
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan Kerja		
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja		
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja		
8	Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja		
LAIN – LAIN TENTANG TENAGA KERJA			
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang Cacat		
2	Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial		
3	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan		
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat		
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat Kerja		
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan		
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja		
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan		
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah Karyawan		
10	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi		
11	Pengungkapkan persentase gaji untuk pension		
12	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan		
13	Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada		
14	Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan		

No	Item Pengungkapan Aspek Sosial	Ya	Tidak
15	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka		
16	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja		
17	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut		
18	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga Kerja		
19	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain		
20	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja		
21	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan		
22	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah		
23	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh		
24	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja		
25	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja Dinegosiasikan		
26	Peningkatan kondisi kerja secara umum		
27	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja		
28	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja		
PRODUK			
1	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan		
2	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah Meningkatkan		
KETERLIBATAN MASYARAKAT			
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung Aktivitas		
2	Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar		
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat		
4	Membantu riset medis		
5	Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni		
6	Membiyai program beasiswa		
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat		
8	Mensponsori kampanye nasional		
9	Mendukung pengembangan industri local		
UMUM			
1	Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat		
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas		

Dimodifikasi dari Hackston dan Milne (1999)